



## PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING*

Roniasi Situmorang, Basuki Hadiprajitno

email : roniasisitumorang@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239. Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the influence of board characteristics and ownership structure toward sustainability reporting disclosure which integrated by annual reports for all listed manufacturing company on the Indonesia Stock Exchange in the year 2013-2014. Board characteristics used in this study are size of commissioner, independent commissioner, size of director, and the existence of female directors, and ownership structure used in this study are public ownership and institutional ownership.*

*The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2013-2014. Total sample is 212 annual report companies as determined by purposive sampling method. This research analyzes sustainability reporting disclosure in annual reports by the method of content analysis. Data analysis was performed with the classical assumption and hypothesis testing of regression method.*

*The results of this study indicate that independent commissioner, size of director, and institutional ownership did not have significant influence to the sustainability reporting disclosure. Size of commissioner, the existence of female directors, and public ownership had significant influence to sustainability reporting disclosure.*

*Keywords: sustainability reporting, commissioner, director, ownership.*

### PENDAHULUAN

Adapun argumentasi yang mendasari atau menjadi latar belakang fokus penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia telah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari terselenggaranya berbagai konferensi yang membahas isu kerusakan lingkungan. Pada tahun 1962, PBB mengadakan konferensi yang menghasilkan kesepakatan untuk melindungi kelestarian dan meningkatkan mutu lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup manusia yang dimuat dalam Deklarasi Stockholm (Saifullah, 2013). Kesepakatan tersebut dikenal dengan gagasan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang.

Perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan laporan keberlanjutan (Suryono dan Prastiwi, 2011). Para pemimpin perusahaan-perusahaan dunia berusaha melakukan pembuktian atas komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dunia dengan melakukan pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (laporan keberlanjutan) dan sekaligus akan mendukung strategi perusahaan (*CSR Quest*, 2009).

Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap *sustainability reporting* dengan mengeluarkan peraturan mengenai *sustainability reporting* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan pada Juli 2007 dan pada April 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan, sehingga mulai tahun 2012 kegiatan tanggungjawab sosial lingkungan dan penyampaian infomasinya menjadi kewajiban seluruh perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Tidak hanya penerbitan laporan keberlanjutan, penelitian tentang pelaporan sosial dan lingkungan atau *sustainability reporting* terus berkembang. Di beberapa penelitian, komponen yang dimasukkan sebagai bagian dari karakteristik perusahaan adalah komposisi dewan direksi dan komisaris. Shamil *et al.* (2014), menjelaskan bahwa komposisi dewan dianggap penting karena dewan direksi dan dewan komisaris merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan. Dari variabel yang diteliti hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan *dual leadership* berpengaruh secara positif, sementara keberadaan wanita dalam dewan direksi secara negatif mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau tidak melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel *dual leadership* karena tidak sesuai dengan sistem tata kelola yang diterapkan di Indonesia. *Dual leadership* merupakan jabatan rangkap yang dipegang oleh satu orang, yaitu sebagai CEO dan sebagai *chairman*. Jabatan *chairman* hanya ada pada model *one-tier board* yang condong pada model *corporate governance* yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon*. Di Indonesia, perusahaan menggunakan *two-tier board system* yang terdiri dari dua dewan terpisah, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem pengawasan ini terdapat pemisahan jabatan antara dewan komisaris yang bertugas sebagai pengawas dan dewan direksi yang bertugas sebagai eksekutif dalam perusahaan. Di dalam penelitian ini terdapat struktur kepemilikan yang umumnya diproksikan dengan kepemilikan institusional, asing, publik, manajerial. Namun, penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan publik dan institusional.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Fokus utama penelitian ini adalah menguji pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian ini berdasar pada teori agensi (*agency theory*) yang berkaitan dengan hubungan pemilik (prinsipal) dan manager (agen) dalam suatu perusahaan yang timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada pihak tersebut (agen) (Jensen dan Meckling, 1976). Ketika agen maupun prinsipal menjalankan perannya masing-masing, pada umumnya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*) dan selalu menghindari risiko (*risk averse*) yang menghasilkan masalah keagenan dan biaya keagenan (Eisenhardt, 1989). Manajer berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham/pemilik perusahaan sehingga memicu biaya keagenan.

Untuk mengurangi masalah keagenan dan biaya keagenan, ditunjuk sebuah dewan pengawas untuk memantau tindakan manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama dan Jensen, 1983; Eisenhardt, 1989; Aguilera dan Jackson, 2003 dalam Shamil *et al.*, 2014). Apabila dihubungkan dengan pengungkapan keberlanjutan, dapat dinyatakan bahwa manajer melakukan pengungkapan keberlanjutan untuk mengurangi biaya agensi, meminimalkan pengawasan internal yang ketat dan memperoleh manfaat dari penyediaan *sustainability reporting* di pasar modal (Shamil *et al.*, 2014).

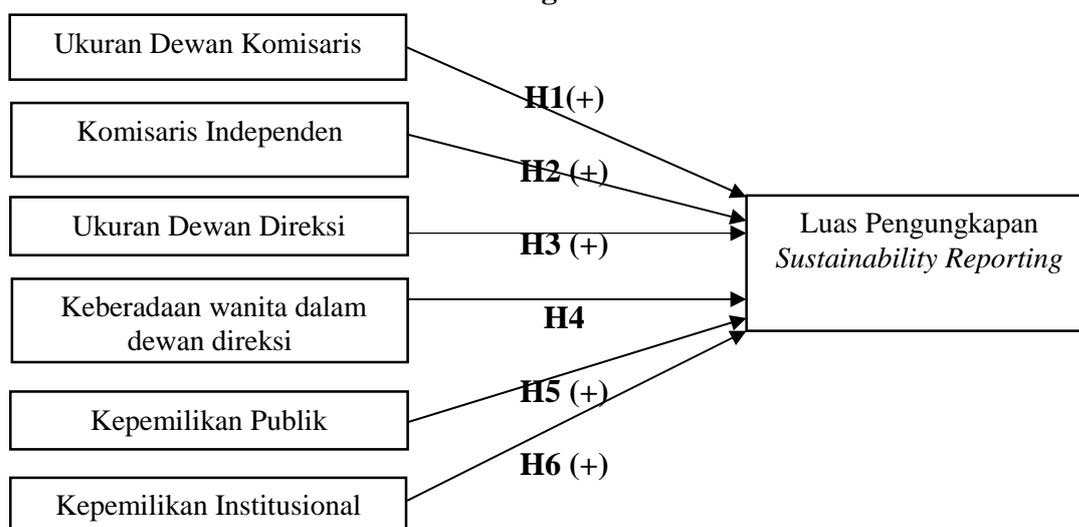
Selanjutnya, teori legitimasi memperluas hubungan prinsipal-agen dengan kelompok yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, kelompok yang mewakili pemangku kepentingan. Manajer akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mendukung mereka memperoleh legitimasi (Shamil *et al.*, 2014). Namun, ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai

masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam yang disebut dengan “*legitimacy gap*” (Lindblom; Dowling dan Pfeffer dalam Chariri, 2008). Oleh karena itu, perlu untuk perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat dengan mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan, organisasi sosial, dan komunitas masyarakat dan lingkungan. Hal-hal tersebut dapat diungkapkan dalam *sustainability report* sebagai perwujudan usaha perusahaan untuk melakukan akuntabilitas kepada publik.

Di dalam pengelolaan perusahaannya, Indonesia menganut sistem *continental* dimana *board of directors* dipisahkan menjadi yaitu *supervisory boards* atau dewan komisaris sebagai fungsi kontrol dan *management board* atau direksi sebagai fungsi eksekutif. Sudiartana (2011) menyatakan bahwa komposisi dewan perusahaan bersifat homogen akan menyebabkan kemungkinan besar strategi-strategi pembuatan keputusan dari mekanisme *corporate governance* akan menjadi tidak *open-minded*, dapat ditebak, dan tidak *fleksibel* sehingga tidak mampu memuaskan segala bentuk kepentingan. Oleh karena itu, dewan yang memiliki diversitas anggota yang lebih tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan bisnis.

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Kepemilikan publik adalah masyarakat umum yang memiliki porsi saham di suatu perusahaan. Sementara, kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan pada akhir tahun (Aini, 2011). Investor institusional lebih memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap keputusan perusahaan, sehingga memiliki kendali atas perusahaan agar melakukan pengungkapan yang lebih luas.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting***

Berdasarkan teori agensi, manajer (agen) dapat bertindak *opportunistik* dan tidak sesuai dengan kepentingan pemilik (prinsipal). Dengan demikian, dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Ada beberapa argumen mengenai dewan komisaris, yakni ketika ukuran dewan komisaris besar maka akan menyebabkan *corporate governance* yang tidak efisien karena akan melemahkan pengawasan terhadap manajemen dan menambah biaya agensi. Sementara, ketika proporsi dewan komisaris kecil maka akan mudah dipengaruhi oleh manajemen dan tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik (Laksana, 2008; Said *et al.*, 2009 dalam Shamil *et al.*, 2014)

Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Semakin ketat pengawasan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk melakukan pengungkapan *sustainability reporting*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam *sustainability reporting*. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1 :** Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Reporting**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Beberapa penelitian menggunakan variabel ini karena komisaris independen menggambarkan peranan dari direktur non-eksekutif. Komisaris independen bertanggungjawab untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen, serta memberi nasihat kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan telah menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh teori agensi, perusahaan membutuhkan dewan yang secara independen mengawasi kinerja agen untuk mengurangi masalah keagenan yang sering muncul dalam hubungan prinsipal-agen. Komisaris independen bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan sudah melakukan kinerja yang memperhatikan seluruh kepentingan. Dengan demikian, komisaris independen sebagai pihak eksternal yang bertugas mengawasi manajemen dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan sosial dan lingkungan.

Penelitian oleh Khan (2010) menemukan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Adanya komisaris independen yang melindungi seluruh pemangku kepentingan perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan, akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 :** Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Reporting**

Dalam penerapan *good corporate governance*, keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh dewan direksi. Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima fungsi yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin besar pula kemungkinan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan.

Jumlah dewan direksi suatu perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan, berarti jumlah yang besar akan berdampak pada pengelolaan yang dilakukan oleh dewan direksi akan semakin baik yang berdampak pada kinerja perusahaan yang akan meningkat dan perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Ketika kinerja perusahaan meningkat, maka perusahaan akan lebih luas dalam melakukan komunikasi kepada *stakeholder* sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat (Wardoyo dan Veronica, 2013). Berdasarkan argumen di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3 :** Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

### **Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Dewan Direksi terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting***

Diversitas dewan adalah isu menarik dan penting dalam penelitian mengenai *corporate governance*, dan para peneliti menemukan bahwa dewan yang *heterogen* memiliki pemahaman yang lebih luas dan kompleks mengenai lingkungan dibandingkan dengan dewan yang *homogen* (Shamil *et al.*,2014). Menurut teori *resource dependence*, segala bentuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus digunakan secara maksimal. Diversifikasi struktur sumber daya manusia yang berkaitan dengan ras dan campuran gender seringkali dipandang sebagai hal penting untuk memaksimalkan sumberdaya penting perusahaan (Siciliano, 1996). Brammer *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa ada dua perspektif yang menjelaskan mengenai keberadaan wanita dalam dewan perusahaan, yakni argumen dari perspektif bisnis dan moral. Kedua argumen ini terbagi menjadi dua yakni argumen untuk kesamaan atau kesetaraan kesempatan dan argument kesamaan atau kesetaraan keterwakilan.

Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan komisaris. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2008) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan bahwa perempuan memiliki kehadiran atau partisipasi yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam dewan direksi secara signifikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Barako dan Brown (2008), Beruang *et al.* (2010), dan Zhang (2012) (dalam Shamil *et al.*,2014) menemukan hubungan positif antara keberadaan wanita dalam dewan direksi dan pengungkapan CSR. Ntim dan Soobaroyen (2013) tidak menemukan hubungan antara keanekaragaman gender dan pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4 :** Keberadaan wanita dalam dewan direksi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

### **Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting***

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan perlu dukungan dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan informasi-informasi yang berhubungan dengan keberlanjutan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Perbedaan proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Khan *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa ketika suatu perusahaan mulai *go public*, maka secara langsung akuntabilitasnya terhadap publik menjadi sangat penting. Adanya kepemilikan saham oleh masyarakat umum akan memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan *visibility* dan *accountability* perusahaan terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Sobhan dan Werner (2003) dalam Khan *et al.* (2012) beralasan bahwa biasanya publik kurang mengerti tentang laporan keuangan dan hanya mencari insentif yang jelas seperti dividen sehingga kebanyakan tidak datang saat rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, maka akan semakin banyak pula detail informasi yang diminta dan dengan demikian pengungkapan akan semakin luas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H5 :** Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana dan institusi keuangan lain. Kepemilikan oleh institusional dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring yang dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Investor institusional memiliki *power dan experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Hal ini berarti, dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong meningkatkan luas pengungkapan *sustainability reporting* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

**H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.**

## METODE PENELITIAN

### Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *sustainability reporting*. Luas pengungkapan *sustainability reporting* ini diukur dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI versi 3.1 yang meliputi 84 item pengungkapan. Jumlah item yang diungkapkan adalah 84, item pengungkapan tersebut antara lain:

1. 9 items pengungkapan dalam Aspek Ekonomi
2. 30 items pengungkapan dalam Aspek Lingkungan
3. 11 items pengungkapan dalam Aspek Hak-Hak Manusia
4. 15 items pengungkapan dalam Aspek Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak
5. 9 items pengungkapan dalam Aspek Tanggung Jawab Produk
6. 10 items pengungkapan dalam Aspek Sosial.

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan cara *content analysis* yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan dalam kategori-kategori yang telah ditentukan *Global Reporting Initiative* (GRI). Perhitungan indeks pengungkapan *sustainability reporting* perusahaan pada laporan tahunan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SRD} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{84}$$

Keterangan :

SRD : Pengungkapan *sustainability reporting* perusahaan

**Tabel 1**  
**Variabel Penelitian**

No	Variabel	Cara Mengukur
	<b>Dependen</b>	
1	Pengungkapan <i>sustainability reporting</i> perusahaan	Membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam GRI versi 3.1 yang meliputi 84 item pengungkapan
	<b>Independen</b>	
2	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan
3	Komisaris Independen	Proporsi jumlah komisaris independen terhadap total komisaris yang ada di perusahaan
4	Ukuran Dewan Direksi	Jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan
5	Keberadaan Wanita dalam Dewan Direksi	Perusahaan yang memiliki dewan direksi perempuan diberi kode "1" dan yang tidak diberi kode "0"
6	Kepemilikan Publik	Persentase saham yang dimiliki oleh publik dibagi dengan total saham yang diterbitkan
7	Kepemilikan Institusional	Persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional dengan total saham yang diterbitkan

### Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur yang diambil dari Bursa Efek Indonesia karena laporan tahunan perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI. Alasan lainnya adalah perusahaan manufaktur merupakan industri yang memberikan dampak/pengaruh yang besar terhadap lingkungan dan telah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan *sustainability reporting*. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan tahunannya selama periode 2013-2014.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2013-2014.
3. Perusahaan yang termasuk dalam sektor farmasi, rokok, kayu, porselen, kimia, logam, makanan dan minuman, pakan ternak, plastik, *pulp*,semen, tekstil,

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa *sustainability reporting* yang terintegrasi dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan.

### Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap pengungkapan *sustainability reporting* perusahaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SRD = 0 + 1 KOM + 2 KOMIN + 3 DIR + 4 DW + 5 PUB + 6 INS +$$

Keterangan :

- KOM : Ukuran Dewan Komisaris  
KOMIN : Ukuran Dewan Komisaris Independen  
DIR : Ukuran Dewan Direksi  
DW : Keberadaan wanita dalam dewan direksi  
PUB : Kepemilikan Publik  
INS : Kepemilikan Institusional  
SRD : Pengungkapan *sustainability reporting*  
: Konstanta  
: Koefisien  
: Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang telah dilakukan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh output statistik deskriptif sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif Data Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SRD	212	,0533	,5930	,215048	,1036868
KOM	212	2	9	4,09	1,619
KOMIN	212	,2000	,8000	,398476	,1054363
DIR	212	2	12	4,87	2,081
DW	212	0	1	,35	,478
PUB	212	,0025	,6700	,240471	,1582862
INST	212	,0000	,8702	,170593	,2427242

**Tabel 3**  
**Hasil Statistik Deskriptif Data Penelitian Variabel Dummy**

Keberadaan Direksi Wanita				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak ada	138	65,1	65,1	65,1
Ada	74	34,9	34,9	100,0
Total	212	100,0	100,0	

Keterangan :

- SRD : *Sustainability Reporting Disclosure*  
KOM : Dewan Komisaris  
KOMIN : Dewan Komisaris Independen  
DIR : Dewan Direksi  
DW : Direksi Wanita  
PUB : Kepemilikan Publik  
INST : Kepemilikan Institutional

### Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan program SPSS pada tingkat signifikansi (*p-value*) 5%. Apabila *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen dan variabel interaksi

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis didukung. Hasil uji yang telah dilakukan ditampilkan pada tabel 4.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Signifikansi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,115	,034		3,394	,001
KOM	,018	,005	,288	3,819	,000
KOMIN	-,054	,062	-,055	-,870	,385
DIR	,003	,004	,061	,786	,433
DW	,040	,014	,185	2,797	,006
PUB	,084	,041	,127	2,018	,045
INST	-,013	,027	-,030	-,471	,638

a. Dependent Variable: SRD

## Interpretasi Hasil

### Hipotesis 1

Hipotesis pertama menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki signifikansi 0,000 dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,018. Hipotesis pertama diterima karena signifikansi dewan komisaris di bawah 0,05 dengan arah hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) yang menemukan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Pengawasan terhadap manajemen yang dilakukan oleh komisaris adalah untuk mengurangi tindakan manajemen yang *opportunistik*. Oleh karena itu, jumlah komisaris yang semakin besar dapat memperketat pengawasan terhadap manajer dan menekan manajer untuk melakukan pengungkapan *sustainability reporting* yang lebih luas demi kepentingan pemilik dan perusahaan.

### Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki signifikansi 0,385 dengan arah negatif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar -0,054. Hipotesis kedua ditolak karena signifikansi dewan komisaris independen di atas 0,05 dengan arah hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini didukung oleh Rahmi (2014) yang menemukan bahwa komisaris independen secara tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Hal ini kemungkinan terjadi akibat keberadaan komisaris independen hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam dan sekedar menunjukkan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance* (Rahmi,

2014). Said et al. (2009) juga menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial lingkungan.

Hal ini membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang besar kemungkinan akan menyebabkan *miss-koordinasi* sehingga tidak efektif dalam melakukan pengawasan. Sementara, proporsi yang semakin sedikit dapat meningkatkan komunikasi internal dan meningkatkan keefektifan untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan pengungkapan, walaupun pengaruh tersebut tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar atau kecilnya proporsi komisaris independen tidak menjadi jaminan akan terwakilinya kepentingan para pemangku kepentingan.

### Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa variabel dewan direksi memiliki signifikansi 0,433 dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,003. Hipotesis ketiga ditolak karena signifikansi dewan direksi di atas 0,05 walaupun memiliki arah hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini didukung oleh Sari (2013) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Hal ini mungkin disebabkan direksi hanya berfokus pada kinerja keuangan perusahaan sehingga kurang memberi perhatian terhadap isu *sustainable development* dan melakukan pengungkapannya. Hal lain yang mungkin terjadi adalah dewan direksi tidak mampu untuk menjalankan tugas dan arahan dari dewan komisaris selaku pengawas dan wakil dari pemilik perusahaan. Dilling (2009) dalam penelitiannya juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shamil *et al.* (2014) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

Berdasarkan teori agensi, ukuran direksi yang besar dapat mengurangi konflik keagenan yang akan membuat kinerja perusahaan meningkat yang diikuti dengan perluasan pengungkapan dan meningkatnya nilai perusahaan di masyarakat dan investor (Wardoyo dan Veronica, 2013). Namun, hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menunjukkan bahwa luas pengungkapan tidak ditentukan ukuran direksi. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran direksi suatu perusahaan tidak menentukan akan luasnya pengungkapan *sustainability reporting* yang dilakukan oleh perusahaan.

### Hipotesis 4

Hipotesis keempat menyatakan keberadaan dewan wanita berpengaruh terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan dewan wanita berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa variabel dewan wanita memiliki signifikansi 0,006 dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,040. Hipotesis keempat diterima karena signifikansi keberadaan dewan wanita di bawah 0,05 dengan arah hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Barako dan Brown (2008), Beruang *et al.* (2010), Zhang (2010) menemukan pengaruh positif antara keberadaan dewan wanita dengan pengungkapan sosial lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan dewan wanita memberikan dampak positif bagi perusahaan sehingga mampu memperluas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil ini sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya dan legitimasi yang menyatakan bahwa direksi yang beragam

dapat meningkatkan kualitas keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk menjangkau seluruh kebutuhan *stakeholder*. Kualitas keputusan yang dihasilkan dalam keputusan pengungkapan yang lebih luas yang diharapkan akan meningkatkan legitimasi perusahaan di masyarakat.

#### **Hipotesis 5**

Hipotesis kelima menyatakan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik memiliki signifikansi 0,045 dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar 0,084. Hipotesis kelima diterima karena signifikansi dewan komisaris independen di bawah 0,05 dengan arah hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al.* (2012) yang menemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan publik dengan pengungkapan sosial lingkungan. Meskipun kepemilikan publik yang ada dalam perusahaan tergolong kecil, tetapi mampu untuk memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi-informasi terkait *visibility* dan *accountability* terhadap sejumlah besar *stakeholder*. Investor publik mampu merepresentasikan dengan jelas apa yang sesungguhnya masyarakat harapkan dari perusahaan, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Investor publik merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, yang akan menentukan legitimasi perusahaan dan masyarakat adalah isu penting dalam *sustainable development*. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh publik dalam perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *sustainability reporting* yang dilakukan oleh perusahaan

#### **Hipotesis 6**

Hipotesis keenam menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi 0,638 dengan arah negatif yang ditunjukkan oleh nilai beta sebesar -0,013. Hipotesis keenam ditolak karena signifikansi kepemilikan institusional di atas 0,05 dengan arah hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis.

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2014) yang menemukan arah negatif dalam pengaruh antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Aini (2011) juga tidak menemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan *sustainability reporting*. Arah negatif yang terjadi tersebut mungkin disebabkan pemilik institusional lebih berfokus pada peningkatan laba perusahaan, sehingga menekan biaya untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan dan menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih kecil karena pengungkapan yang semakin luas akan meningkatkan biaya.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan tidak menentukan luas pengungkapan *sustainability reporting* yang mungkin disebabkan kurang perhatiannya pemilik institusional terhadap keputusan perusahaan dan dari data yang didapatkan banyak perusahaan yang tidak memiliki investor institusional.

### **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian empiris dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-

2014 dengan total sampel sebanyak 212 perusahaan yang diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama dengan variabel ukuran dewan komisaris dinyatakan diterima yang berarti ukuran dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua dengan variabel proporsi dewan komisaris independen dinyatakan ditolak dengan arah pengaruh yang berlawanan dengan hipotesis yang berarti proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga dengan variabel ukuran direksi dinyatakan ditolak yang berarti jumlah direksi tidak mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat dengan variabel keberadaan dewan wanita dalam dewan direksi dinyatakan diterima yang artinya keberagaman dewan mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima dengan variabel kepemilikan publik dinyatakan diterima yang artinya kepemilikan publik mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hasil pengujian terhadap hipotesis keenam dengan variabel kepemilikan institusional dinyatakan ditolak dengan arah pengaruh yang berlawanan dengan hipotesis yang artinya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan *sustainability reporting*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu *pertama*, rendahnya nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini, yaitu sebesar 16,8% untuk data sampel perusahaan industri manufaktur. Sisanya 83,2% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini berpengaruh lebih besar terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. *Kedua*, sampel penelitian ini hanya menganalisis dan menguji perusahaan manufaktur di beberapa sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan-perusahaan lainnya selain perusahaan manufaktur. *Ketiga*, penelitian ini menggunakan laporan tahunan sebagai sumber dalam penentuan luas pengungkapan *sustainability reporting* yang kecenderungannya hanya melaporkan indikator-indikator tertentu saja sehingga hasilnya tidak merepresentasikan dengan baik luas pengungkapan yang mungkin dilaporkan dalam *sustainability report* terpisah. *Keempat*, terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks luas pengungkapan *sustainability reporting*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi masing-masing peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis item-item pengungkapan *sustainability reporting* dengan menggunakan indeks GRI G3.1 pada laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: *pertama*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sektor perusahaan yang akan diteliti dan diuji, tidak terbatas pada beberapa sektor perusahaan manufaktur saja. *Kedua*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang berbeda, yaitu seperti wawancara langsung untuk mengumpulkan data. *Ketiga*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan *sustainability report* yang terpisah untuk sumber utama pengukuran pengungkapan dikarenakan laporan tersebut lebih khusus melaporkan tentang keberlanjutan perusahaan, walaupun dapat diintegrasikan dalam laporan tahunan. *Keempat*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel yang lain untuk melengkapi karakteristik dewan dan struktur kepemilikan seperti usia, jumlah rapat, jenis kepemilikan yang lain yang berdasarkan penelitian lain dapat memberikan pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

**REFERENSI**

- Aini, Nike Nur. 2011. "Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)." Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chairiri, Anis. 2008. "Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian Pengungkapan Sosial dan Lingkungan". *Jurnal Maksi*, Vol.8, No.2, h.151-169
- CSR Quest. 2009. "Corporate Sustainability". <<http://www.csrquest.net/default.aspx.articleID=13111&heading>>, diakses 17 April 2015.
- Eisenhardt, K.M. (1989), "Agency theory: an assessment and review", *Academy of Management Review*, Vol. 14 No. 1, pp. 57-74.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 21-Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M and Meckling, W.1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4. pp.305-360.
- Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin, dan Javed Siddiqui. 2012. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy". *Journal of Business Ethics*. Vol.113, No.2, pp. 203-227.
- Khan, Mohammad Habib Uz Zaman. 2010. "The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence from Private Commercial Banks of Bangladesh". *International Journal of Law and Management*, Vol. 52, pp. 82-109.
- Murwaningsari, Ety. 2009. "Hubungan *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* dalam Satu *Continuum*". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, h. 30- 41.
- Ntim, C.G. and Soobaroyen, T. 2013. "Black economic empowerment disclosures by South African listed corporations: the influence of ownership and board characteristics", *Journal of Business Ethics*, Vol. 116 No. 1, pp. 121-138
- Rahmi, Raras Halida. 2014, "Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ratnasari, Yunita. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam *Sustainability Report*". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saifullah.2013. "Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia". <http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/paradigma-pembangunan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>. diakses pada 15 April 2015.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Simposium Nasional Akuntansi* 8, h. 379-395.
- Shamil, [Mohamed M.](#), [Junaid M. Shaikh](#), [Poh-Ling Ho](#), [Anbalagan Krishnan](#). 2014. "The influence of board characteristics on sustainability reporting: Empirical evidence from Sri Lankan firms". *Asian Review of Accounting*, Vol. 22 Iss: 2, pp.78 – 97
- Sudiartana, I Made. 2011. "Pengaruh Diversitas Gender dan Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela". Universitas Udayana, Denpasar.



- Suryono, Hari dan Andri Prastiwi. 2011. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governnce Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report". Simposium Nasional Akuntansi XIV. Banda Aceh, 21-22 Juli 2011.
- Wardoyo dan Theodora Veronica, 2013. "Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 4, No. 2, pp: 132-149.
- Whitehead, John. 2006. "Global Warming and Sustainability". [http://www.envecon.net/2006/08/global\\_warming\\_](http://www.envecon.net/2006/08/global_warming_). diakses tanggal 18 April 2015.